

Dinamika Sosial Ekonomi dalam Konsep Penataan Ruang Pembangunan Bendungan di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Devie Indriany Moha¹, Desi Ade Trya²

^{1,2}STPN Yogyakarta-¹devieindriany@stp.ac.id

²desi.atrya@atrbpn.go.id

Abstrak-*Pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok-Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung memberikan perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pemanfaatan ruang wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan bendungan terhadap kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, pendapatan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan arahan RTRW Kabupaten Badung dan RDTR Kecamatan Petang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat yang terkena dan terdampak pembangunan bendungan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Bendungan Sidan menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat terutama pada peningkatan mobilitas dan interaksi sosial akibat adanya akses jalan baru. Selain itu, terjadi perubahan mata pencaharian pada masyarakat terdampak yang beralih menjadi pedagang, pekerja proyek, dan wirausaha kecil. Perubahan tersebut juga diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat terdampak, sedangkan masyarakat yang terkena langsung relatif tidak mengalami perubahan pendapatan yang signifikan karena masih bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Badung dan RDTR Kecamatan Petang, pembangunan Bendungan Sidan sejalan dengan arahan penataan ruang sebagai kawasan pertanian berkelanjutan, kawasan agropolitan, dan kawasan konservasi sumber daya air. Pembangunan bendungan juga berpotensi mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata dan perdagangan. Namun demikian, perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi perlu dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung dan fungsi pertanian wilayah. Dengan demikian, pembangunan Bendungan Sidan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun tetap memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan wilayah dapat berlangsung secara berkelanjutan.*

Kata Kunci : *Bendungan, Sosial Ekonomi, Pemanfaatan Ruang*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara berkembang maupun maju menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen kebijakan untuk mempercepat pembangunan wilayah, meningkatkan konektivitas, serta membuka peluang ekonomi baru. Infrastruktur seperti

bandungan, jalan, pelabuhan, dan jaringan air berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta mendukung distribusi sumber daya secara lebih merata.

Salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas ekonomi dan pemerataan sumber daya serta pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan Bandara, Jalan Tol, dan Bendungan (Rahmayanti *et al.* 2014). Pembangunan bendungan menjadi bagian penting dari strategi ketahanan air dan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010, bendungan didefinisikan sebagai bangunan yang dapat berupa urukan tanah, urukan batu, beton, maupun pasangan batu yang dibangun untuk menahan dan menampung air sehingga membentuk waduk. Selain itu, bendungan juga dapat difungsikan untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*) maupun lumpur (Wayangkau, 2021). Sementara itu, Jannataa (2021) menjelaskan bahwa bendungan merupakan struktur yang dibangun melintang pada aliran sungai dengan tujuan menaikkan muka air dan membentuk tampungan air yang dikenal sebagai waduk. Dalam proses pembangunan bendungan, salah satu tahapan penting yang dilakukan adalah pengalihan aliran sungai sementara guna memudahkan pelaksanaan konstruksi bangunan bendungan. Pembangunan bendungan menjadi bagian penting dari strategi ketahanan air dan energi. Bendungan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air irigasi dan pengendali banjir, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan pertanian, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya. Banyak negara seperti China, India, dan Brasil mengembangkan bendungan sebagai instrumen pembangunan wilayah yang mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perdesaan.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur berskala besar juga menimbulkan tantangan sosial ekonomi yang menjadi perhatian global. Salah satu isu utama adalah perubahan penggunaan lahan dan transformasi struktur ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan bendungan seringkali mengubah kawasan pertanian menjadi kawasan pariwisata atau ekonomi baru, sehingga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Kondisi ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan dan marginalisasi masyarakat lokal (*World Commission on Dams*, 2000).

Perlunya integrasi pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang dan tanpa pengendalian pemanfaatan ruang yang baik, pembangunan infrastruktur dapat mendorong *urban sprawl*, alih fungsi lahan pertanian, serta tekanan terhadap lingkungan, seperti halnya pembangunan Bendungan Belok-Sidan. Pembangunan bendungan di wilayah ini direncanakan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi pada musim hujan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Desa Belok Sidan memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi dengan frekuensi kejadian sekitar tiga hingga empat kali setiap tahun. Pembangunan Bendungan Sidan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bali–Penida (Direktorat Jenderal SDA, 2019). Secara geografis, Bendungan Sidan berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung. Pemanfaatan lahan pertanian sebagai lokasi pembangunan bendungan berimplikasi pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Proses konstruksi bendungan yang dimulai pada tahun 2018, diawali dengan kegiatan pembebasan lahan untuk fasilitas pendukung, mulai menimbulkan dampak bagi masyarakat. Perubahan lingkungan akibat pembangunan bendungan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, terutama melalui perubahan fungsi lahan dari lahan milik masyarakat menjadi area pembangunan bendungan. Kondisi ini kemudian memicu perubahan mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan bendungan membawa implikasi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat yang perlu diakomodasi dalam kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimana dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Belok Sidan akibat pembangunan Bendungan Belok-Sidan?; 2) Bagaimana peran penataan ruang melalui RTRW Kabupaten Badung dan RDTR Kecamatan Petang dalam mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan terdampak pembangunan Bendungan Belok-Sidan?. Penelitian ini bertujuan : (1) Menganalisis dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Belok Sidan akibat pembangunan Bendungan Belok-Sidan; 2) Merumuskan peran penataan ruang melalui RTRW Kabupaten Badung dan RDTR Kecamatan Petang dalam mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan terdampak pembangunan Bendungan Belok-Sidan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bendungan merupakan bangunan yang dirancang untuk menampung air dari sungai atau saluran lainnya yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti irigasi, penyediaan air baku, pembangkit listrik, serta pengendalian banjir. Pembangunan bendungan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada wilayah yang rentan mengalami kekeringan (Kementerian PUPR, 2019). Dampak pembangunan bendungan dinilai cukup signifikan terhadap perkembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama pada kawasan yang terhubung melalui pengelolaan sumber daya air (Noor dkk., 2017). Selain itu, pembangunan bendungan juga bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta menjaga keseimbangan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan aspek keadilan (Rahmawati & Tenriajeng, 2020). Manullang dan Samosir (2019) menyatakan bahwa bendungan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan wilayah karena mampu mempercepat distribusi air untuk irigasi maupun penyediaan air bersih.

Selain berperan dalam pengembangan ekonomi wilayah, pembangunan bendungan juga berkontribusi dalam mengurangi risiko bencana seperti banjir dan kekeringan yang kerap mengancam kawasan tertentu. Keberadaan bendungan memungkinkan pengelolaan air secara lebih efektif, yaitu dengan menampung air pada musim hujan dan memanfaatkannya untuk irigasi pada musim kemarau. Kondisi ini dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Sari, 2021).

Kondisi sosial ekonomi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Maruwae (2020) menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi berkaitan dengan

hubungan antara status sosial dan pola kehidupan sehari-hari yang telah berkembang dan menjadi kebiasaan dalam individu maupun kelompok. Pola kehidupan yang telah mengakar tersebut dikenal sebagai *culture activity*. Sementara itu, Beno, Silen, dan Yanti (2022) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi menggambarkan posisi seseorang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis tempat tinggal, serta jumlah kekayaan yang dimiliki.

Kondisi Sosial Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kondisi diartikan sebagai keadaan atau situasi tertentu. Achmad (2019) menjelaskan bahwa kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan situasi kehidupan masyarakat pada suatu wilayah yang berhubungan dengan aspek sosial. Selanjutnya, Ferdini (2019) menyatakan bahwa suatu pembangunan dapat memberikan dampak terhadap kondisi sosial masyarakat, yang dapat diukur melalui indikator kebiasaan serta sikap yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

1) Sikap Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sikap diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang didasarkan pada pendirian dan keyakinan seseorang. Ferdini (2019) menjelaskan bahwa sikap merupakan respons yang muncul sebagai reaksi terhadap berbagai situasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks ini, sikap menjadi prasyarat yang mendorong terbentuknya suatu tindakan. Pembentukan sikap individu tidak bersifat bawaan sejak lahir, tetapi berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Sejalan dengan itu, Hasanah (2019) menyatakan bahwa sikap (*attitude*) merupakan respons internal individu terhadap suatu stimulus atau objek tertentu.

2) Kebiasaan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan diartikan sebagai sesuatu yang biasa dilakukan atau pola perilaku dalam merespons situasi tertentu yang dipelajari oleh individu dan dilakukan secara berulang. Sulfan Wandu (2018) menjelaskan bahwa kebiasaan merupakan aktivitas yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Sementara itu, Ferdini (2019) menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat tercermin melalui berbagai aktivitas sosial seperti gotong royong, kerja bakti, menjalin silaturahmi, serta menghadiri undangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Frinces (2010) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi merupakan posisi seseorang dalam masyarakat yang secara rasional menempatkan individu pada kedudukan tertentu. Kedudukan tersebut juga disertai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status ekonomi yang dimiliki. Sementara itu, Noor et al. (2017) menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dalam proses pembangunan dapat mengalami perubahan yang berdampak pada mata pencaharian, tingkat pendapatan, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, serta aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya.

1) Mata Pencaharian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata pencaharian merupakan pekerjaan utama yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Noor et al. (2017) menjelaskan bahwa mata pencaharian berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dijalani seseorang dan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh setiap bulan. Wibowo

(2017) menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah dapat mempengaruhi perubahan mata pencaharian penduduk. Selain itu, Azizah, *et al.*, (2018) mengemukakan bahwa perubahan mata pencaharian merupakan salah satu strategi masyarakat dalam mencapai keberlanjutan kehidupan.

2) Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan diartikan sebagai jumlah uang yang diterima dalam suatu periode tertentu. Noor *et al.* (2017) menyatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dijalani, baik pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan. Pendapatan juga dapat dimaknai sebagai total penerimaan yang diperoleh seseorang sebagai imbalan atas tenaga atau pemikiran yang diberikan kepada pihak lain, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu (Rofiulloh dan Mahasiswa, n.d.). Sementara itu, Handoko dan Purwati (2019) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan penerimaan yang diperoleh individu atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, maupun laba, serta dapat mencakup berbagai tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan pensiun.

Rencana Tata Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal tersebut telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana tata ruang merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan pengembangan wilayah. Rencana tata ruang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat struktur ruang dan pola ruang sebagai arahan pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan (UU No. 26 Tahun 2007).

Struktur ruang dalam rencana tata ruang menggambarkan susunan pusat-pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kedua komponen tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan pembangunan wilayah agar lebih terencana dan terkendali (Tarigan, 2012). Rencana tata ruang juga berperan sebagai instrumen pengendalian pembangunan wilayah. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2010), perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk mengatur pemanfaatan ruang agar kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara efisien, berkelanjutan, dan mengurangi konflik penggunaan lahan. Melalui rencana tata ruang, pemerintah dapat menentukan fungsi kawasan, mengendalikan alih fungsi lahan, serta mengarahkan pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, rencana tata ruang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Yunus (2010) menyatakan bahwa perubahan pemanfaatan ruang akan berpengaruh terhadap perubahan aktivitas ekonomi, pola permukiman, dan interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus mampu mengakomodasi perkembangan wilayah sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam implementasinya, rencana tata ruang dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RTRW berfungsi sebagai arahan umum pemanfaatan ruang wilayah, sedangkan RDTR memberikan arahan yang lebih rinci terkait zonasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR juga menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan (Kementerian ATR/BPN, 2021). Dengan demikian, rencana tata ruang menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan wilayah agar terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat.

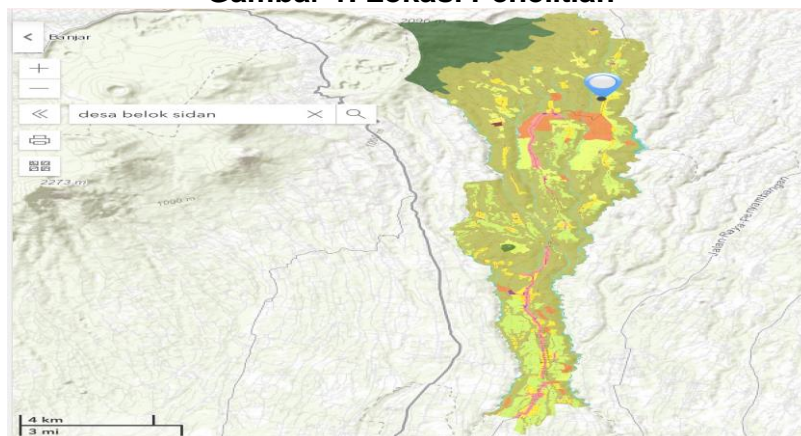
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Saleh (2021) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan memberikan ruang bagi partisipan untuk mengungkapkan pengalaman, perasaan, serta pandangan mereka sesuai dengan konteks yang diteliti.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam konteks penataan ruang pembangunan bendungan secara komprehensif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis keterkaitan antara perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan arahan penataan ruang berdasarkan RTRW dan RDTR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perencanaan wilayah dan ekonomi wilayah yang menitikberatkan pada analisis keterkaitan dinamika sosial ekonomi masyarakat dengan arahan pemanfaatan ruang. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perubahan sosial ekonomi masyarakat akibat pembangunan bendungan serta implikasinya terhadap penataan ruang wilayah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasi penelitian dipilih karena wilayah tersebut merupakan kawasan yang terdampak pembangunan Bendungan Sidan. Pembangunan bendungan tersebut berpotensi mempengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat serta perubahan pemanfaatan ruang wilayah. Selain itu, Desa Belok Sidan juga memiliki karakteristik wilayah perdesaan dengan potensi pertanian, pariwisata, dan pengembangan ekonomi lokal yang cukup besar.

Gambar 1. Lokasi Penelitian



Sumber : RDTR Interaktif, Gistaru ATR/BPN, 2024

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder . Menurut Sugiyono, (2018:456) dalam (Andini 2023) menyatakan bahwa data primer adalah sumber informasi yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulnya. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau lokasi di mana objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara antara peneliti dengan informan yang terdiri dari masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Belok-Sidan serta aparat Desa Belok-Sidan. Informasi yang dikumpulkan meliputi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, serta perkembangan pelaksanaan pembangunan Bendungan Belok-Sidan di Desa Belok Sidan. Sugiyono (2013) dalam (Nurjanah 2021) menerangkan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulnya, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau melalui dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Dokumen RTRW Kabupaten Badung
- b) Dokumen RDTR Kecamatan Petang
- c) Literatur terkait dinamika sosial ekonomi masyarakat
- d) Literatur perencanaan tata ruang

Data sekunder digunakan untuk menganalisis dinamika sosial ekonomi masyarakat dan arahan pemanfaatan ruang kawasan sekitar bendungan.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur sehingga memungkinkan informan memberikan jawaban secara lebih luas sesuai dengan kondisi yang dialami. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan Kantor Desa Belok-Sidan. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah serta kondisi lokasi objek penelitian secara langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen terkait diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses reduksi dilakukan dengan memfokuskan data pada aspek dinamika sosial ekonomi masyarakat dan arahan penataan ruang kawasan pembangunan Bendungan Belok-Sidan. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian disederhanakan, sedangkan data yang berkaitan dengan perubahan mata pencaharian, pendapatan masyarakat, serta arahan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW dan RDTR dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar variabel penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan dinamika sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pembangunan bendungan serta menguraikan arahan penataan ruang yang berlaku pada kawasan penelitian. Melalui penyajian data ini, dapat dilihat keterkaitan antara perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan kebijakan penataan ruang wilayah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, dilakukan interpretasi data yang telah disajikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam konsep penataan ruang pembangunan Bendungan Belok-Sidan. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara berulang dengan mencermati kembali data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Terdampak Pembangunan Bendungan Sidan

Lokasi pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok-Sidan berada pada wilayah yang mencakup tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli. Dari ketiga wilayah tersebut, Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah yang terdampak langsung oleh pembangunan bendungan, khususnya di Desa Belok-Sidan. Sebagian besar bidang tanah yang terkena dampak merupakan lahan pertanian milik masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani, wirausaha, maupun pedagang mengalami perubahan dalam aktivitas ekonomi karena lahan usaha yang dimiliki terdampak oleh pembangunan Bendungan Sidan. Perubahan pemanfaatan ruang ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik wilayah, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat beralih fungsi menjadi area pembangunan bendungan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani mengalami perubahan aktivitas ekonomi dan harus mencari alternatif mata pencaharian lainnya.

Analisis Dinamika Sosial Masyarakat Perubahan Sikap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 25 informan mengenai perubahan sikap masyarakat akibat pembangunan Bendungan Belok-Sidan, diketahui bahwa terdapat perbedaan respons antara masyarakat yang terkena langsung dan masyarakat yang terdampak tidak langsung. Dari 15 informan yang termasuk dalam kategori masyarakat terkena, sebanyak 6 orang atau 24% mengalami perubahan sikap, sedangkan 9 orang lainnya tidak mengalami perubahan. Sementara itu, dari 10 informan dalam kategori masyarakat terdampak, seluruhnya tidak menunjukkan perubahan sikap atau sebesar 40% dari total responden mempertahankan sikap yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sikap lebih banyak terjadi pada masyarakat yang terkena langsung oleh pembangunan bendungan. Perubahan sikap yang terjadi pada masyarakat terkena terutama dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap penetapan nilai ganti rugi, khususnya pada penilaian tanaman di atas lahan. Sebagian masyarakat menilai bahwa penetapan nilai ganti rugi belum mencerminkan perbedaan antara tanaman yang dirawat dengan tanaman yang tumbuh secara alami. Kondisi tersebut memunculkan persepsi ketidakadilan yang kemudian mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pembangunan bendungan. Selain itu, perbedaan nilai ganti rugi juga menimbulkan kerenggangan hubungan sosial, perasaan iri, serta perbedaan pandangan antar masyarakat, meskipun kondisi tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berkembang menjadi konflik besar. Sementara itu, masyarakat yang terdampak tidak langsung cenderung tidak mengalami perubahan sikap yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kelompok masyarakat ini tidak mengalami pengadaan tanah secara langsung serta tidak kehilangan lahan usaha mereka. Dengan demikian, pembangunan bendungan tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kondisi sosial mereka. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan sikap masyarakat lebih dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dan dampak langsung yang dirasakan, khususnya terkait proses pengadaan tanah dan penetapan nilai ganti rugi.

Perubahan Kebiasaan Masyarakat

Pada wawancara terhadap 25 informan mengenai perubahan kebiasaan masyarakat akibat pembangunan Bendungan Belok-Sidan, diketahui bahwa pembangunan bendungan memberikan pengaruh terhadap kebiasaan masyarakat baik yang terkena langsung maupun yang terdampak tidak langsung. Pada kelompok masyarakat terkena yang berjumlah 15 orang, sebanyak 9 orang mengalami perubahan kebiasaan, sedangkan 6 orang lainnya tidak mengalami perubahan. Sementara itu, pada kelompok masyarakat terdampak yang berjumlah 10 orang, sebanyak 4 orang mengalami perubahan kebiasaan dan 6 orang lainnya tetap mempertahankan kebiasaan yang ada. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan lebih dominan terjadi pada masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan dibandingkan masyarakat yang hanya terdampak.

Perubahan kebiasaan masyarakat yang terjadi meliputi perubahan dalam pola interaksi sosial, mobilitas masyarakat, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Kebiasaan masyarakat Desa Belok-Sidan yang sebelumnya meliputi gotong royong, kerja bakti, saling membantu pada saat hajatan, menjenguk warga yang sakit, serta silaturahmi antar keluarga mengalami dinamika akibat pembangunan bendungan. Perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah peningkatan intensitas silaturahmi antar warga. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembangunan akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan waktu tempuh menjadi lebih singkat.

Kemudahan aksesibilitas tersebut memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial masyarakat karena interaksi antar warga menjadi lebih intensif. Masyarakat dapat lebih mudah mengunjungi keluarga maupun kerabat di wilayah sekitar, sehingga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Namun demikian, peningkatan mobilitas juga berpotensi memunculkan perubahan dinamika sosial, seperti meningkatnya interaksi dengan masyarakat luar yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang telah berkembang sebelumnya. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kebiasaan tradisional masyarakat, seperti kegiatan gotong royong dan kerja bakti, meskipun perubahan tersebut belum terlihat secara signifikan.

Selain itu, perubahan kebiasaan masyarakat juga berkaitan dengan meningkatnya akses terhadap peluang ekonomi di wilayah lain. Kemudahan mobilitas memungkinkan masyarakat untuk menjangkau pasar dan kesempatan kerja di luar desa. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat menimbulkan perbedaan tingkat manfaat yang diterima antar kelompok masyarakat. Secara keseluruhan, pembangunan Bendungan Belok-Sidan menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat, terutama dalam aspek interaksi sosial dan mobilitas wilayah.

Analisis Kondisi Ekonomi Masyarakat

Perubahan Mata Pencaharian

Perubahan mata pencaharian masyarakat pada 25 informan akibat pembangunan Bendungan Belok-Sidan, ditemukan lebih banyak terjadi pada masyarakat yang terdampak dibandingkan masyarakat yang terkena langsung. Pada kelompok masyarakat terkena yang berjumlah 15 orang, sebanyak 14 orang tetap mempertahankan mata pencaharian sebelumnya sebagai petani atau ibu rumah tangga, sedangkan hanya 1 orang yang mengalami perubahan mata pencaharian dari tidak bekerja menjadi pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Sementara itu, pada kelompok masyarakat terdampak yang berjumlah 10 orang, sebanyak 6 orang mengalami perubahan mata pencaharian dan 4 orang lainnya tidak mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi peralihan dari tidak bekerja menjadi pedagang, pekerja keamanan proyek, wirausaha, serta pekerja bendungan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan mata pencaharian paling banyak terjadi pada masyarakat terdampak dengan jumlah sekitar 8 orang atau 32%, sedangkan masyarakat yang tidak mengalami perubahan paling banyak berasal dari kelompok masyarakat terkena yaitu sebanyak 14 orang atau 56%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat terdampak lebih adaptif terhadap peluang ekonomi baru yang muncul akibat pembangunan bendungan.

Perubahan mata pencaharian pada masyarakat terdampak terutama dipengaruhi oleh munculnya peluang ekonomi baru di sekitar lokasi pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berjualan, bekerja sebagai tenaga keamanan, maupun terlibat sebagai pekerja proyek. Selain itu, potensi kawasan bendungan sebagai destinasi wisata juga mendorong masyarakat untuk membuka usaha kecil seperti warung dan perdagangan informal. Kondisi ini memberikan peluang peningkatan pendapatan serta mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Di sisi lain, masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan sebagian besar tetap bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian yang terkena pembangunan hanya sebagian kecil dari total lahan yang dimiliki, sehingga masyarakat masih dapat melanjutkan aktivitas pertanian. Meskipun demikian, perubahan lingkungan akibat pembangunan bendungan berpotensi mempengaruhi aktivitas pertanian, seperti perubahan akses air, kondisi tanah, dan pola tanam. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian dan pendapatan petani.

Secara keseluruhan, pembangunan Bendungan Belok-Sidan memberikan dampak terhadap dinamika mata pencaharian masyarakat. Masyarakat terdampak cenderung mengalami perubahan pekerjaan dengan memanfaatkan peluang ekonomi baru, sedangkan masyarakat terkena sebagian besar tetap mempertahankan mata pencaharian di sektor pertanian. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan bendungan menciptakan peluang ekonomi sekaligus tantangan bagi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Perubahan Pendapatan Masyarakat

Perubahan pendapatan masyarakat terhadap 25 informan mengenai akibat pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok-Sidan, diketahui bahwa perubahan pendapatan berbeda antara masyarakat yang terkena langsung dan masyarakat yang terdampak. Pada kelompok masyarakat terkena yang berjumlah 15 orang, sebanyak 14 orang tidak mengalami perubahan pendapatan dan tetap berada pada kisaran pendapatan yang sama, yaitu sekitar Rp2.500.000. Hanya satu orang yang mengalami perubahan pendapatan, yaitu dari sebelumnya tidak memiliki pendapatan menjadi memperoleh pendapatan sekitar Rp2.000.000 setelah beralih menjadi pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan masih mempertahankan mata pencaharian utama sebagai petani, sehingga pendapatan mereka relatif stabil.

Berbeda dengan masyarakat terkena, perubahan pendapatan lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat terdampak. Dari 10 informan yang termasuk dalam kategori terdampak, sebanyak 6 orang mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan 4 orang lainnya tidak mengalami perubahan. Peningkatan pendapatan terjadi karena masyarakat terdampak memanfaatkan peluang ekonomi baru yang muncul akibat pembangunan bendungan, seperti bekerja sebagai tenaga keamanan proyek, pekerja bendungan, pedagang, serta membuka usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan. Secara keseluruhan, masyarakat yang mengalami perubahan pendapatan paling banyak berasal dari kelompok masyarakat terdampak, sedangkan masyarakat yang tidak mengalami perubahan pendapatan didominasi oleh kelompok masyarakat terkena. Peningkatan pendapatan pada masyarakat terdampak menunjukkan bahwa pembangunan bendungan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Kehadiran pekerja proyek dan potensi pengembangan kawasan bendungan mendorong masyarakat untuk membuka usaha kecil, seperti warung makan dan perdagangan informal. Selain itu, pembangunan bendungan juga menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan cenderung tidak mengalami perubahan pendapatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang terkena tetap bekerja sebagai petani dan lahan yang terdampak pembangunan hanya sebagian kecil dari total lahan yang dimiliki. Meskipun demikian, beberapa masyarakat terkena mulai menambah pekerjaan sampingan seperti berdagang kecil untuk meningkatkan pendapatan, namun perubahan tersebut tidak terjadi secara menyeluruh. Pembangunan Bendungan Sidan memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat terdampak yang mengalami peningkatan pendapatan akibat peluang ekonomi baru. Sementara itu, masyarakat terkena cenderung mempertahankan pendapatan yang relatif stabil karena masih bergantung pada sektor pertanian. Perbedaan perubahan pendapatan ini menunjukkan bahwa pembangunan bendungan menciptakan peluang ekonomi sekaligus potensi kesenjangan manfaat antar kelompok masyarakat.

Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil studi literatur mengenai pembangunan bendungan dan implikasinya terhadap penataan ruang, pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok-Sidan menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan beralihnya sebagian lahan pertanian masyarakat menjadi kawasan infrastruktur bendungan, kawasan konstruksi, fasilitas pendukung bendungan, serta pembangunan akses jalan menuju lokasi bendungan. Perubahan fungsi ruang ini mengakibatkan transformasi struktur ruang wilayah perdesaan yang sebelumnya didominasi oleh aktivitas pertanian menjadi kawasan dengan fungsi campuran antara infrastruktur, jasa, dan aktivitas ekonomi baru.

Perubahan pemanfaatan ruang tersebut juga berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian produktif yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan bendungan menyebabkan perubahan pola penggunaan ruang dari fungsi budidaya menjadi fungsi infrastruktur. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi sistem ekonomi lokal yang sebelumnya berbasis pertanian menjadi lebih beragam dengan munculnya aktivitas non-pertanian seperti perdagangan, jasa, serta kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan bendungan. Selain itu, pembangunan akses jalan menuju bendungan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan struktur ruang wilayah. Aksesibilitas yang meningkat mendorong perkembangan aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan bendungan. Kawasan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses mulai berkembang menjadi kawasan dengan mobilitas yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi mendorong munculnya pusat-pusat kegiatan baru seperti perdagangan lokal, usaha kecil masyarakat, serta pengembangan wisata berbasis bendungan. Dengan demikian, perubahan pemanfaatan ruang tidak hanya terjadi pada fungsi lahan, tetapi juga pada dinamika aktivitas wilayah.

Perubahan pemanfaatan ruang akibat pembangunan bendungan juga berpotensi mempengaruhi pola permukiman masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas dapat mendorong perkembangan permukiman baru di sekitar kawasan bendungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan bendungan berperan sebagai pemicu perubahan struktur ruang wilayah yang dapat mengarah pada pertumbuhan kawasan baru. Jika tidak diatur dengan baik, perubahan ini dapat memicu alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta mengurangi keberlanjutan lahan pertanian.

Analisis Berdasarkan Rencana Tata Ruang

Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2025–2045, Kecamatan Petang merupakan bagian wilayah utara Kabupaten Badung yang diarahkan sebagai kawasan berbasis ekosistem pegunungan dan pertanian. Wilayah utara ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi lingkungan dan pengembangan pertanian berkelanjutan yang mendukung keseimbangan ekologi wilayah Kabupaten Badung. Arahan tersebut menekankan bahwa pembangunan wilayah harus tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam RTRW Kabupaten Badung, tujuan penataan ruang wilayah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayah berbasis pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata secara berkelanjutan dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah Kecamatan Petang, termasuk Desa Belok-Sidan, diarahkan untuk mendukung kegiatan pertanian, konservasi lingkungan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. RTRW Kabupaten Badung juga menetapkan Kecamatan Petang sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perkotaan agropolitan. Selain itu, Kecamatan Petang juga ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan terintegrasi yang berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Petang diarahkan sebagai kawasan pengembangan pertanian terpadu yang didukung oleh infrastruktur dan kegiatan ekonomi lokal.

Arahan RTRW juga menekankan bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan konservasi lingkungan, perlindungan sistem hidrologi, serta pengendalian kegiatan yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan. Dalam kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui rehabilitasi lahan, perlindungan vegetasi, serta pembatasan kegiatan yang berisiko terhadap stabilitas kawasan. Ketentuan ini penting karena Kecamatan Petang merupakan kawasan dataran tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

Jika dikaitkan dengan pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok-Sidan, maka pembangunan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari arahan RTRW dalam penguatan sistem pengelolaan sumber daya air, pengembangan kawasan agropolitan, serta peningkatan infrastruktur wilayah. Bendungan berfungsi mendukung konservasi air, meningkatkan irigasi pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan yang menjadi salah satu arahan utama dalam RTRW Kabupaten Badung. Selain itu, pembangunan bendungan juga berpotensi mendukung pengembangan ekonomi wilayah melalui kegiatan pariwisata alam dan aktivitas ekonomi lokal.

Arahan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Petang Tahun 2023 - 2043

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Petang Tahun 2023–2043, wilayah perencanaan Petang mencakup seluruh Kecamatan Petang termasuk Desa Belok/Sidan sebagai bagian dari wilayah yang direncanakan secara khusus dalam pengaturan tata ruang. Wilayah Perencanaan Petang memiliki luas sekitar 9.233,70 hektare yang meliputi beberapa desa, salah satunya Desa Belok/Sidan dengan luas sekitar 2.625,35 hektare. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) yang menjelaskan batas wilayah serta cakupan desa dalam wilayah perencanaan RDTR Petang Ruang lingkup pengaturan RDTR Petang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2023. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah di Kecamatan Petang, termasuk kawasan pembangunan Bendungan Sidan.

Dalam RDTR Kecamatan Petang, pola ruang wilayah dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi zona badan air, zona hutan lindung, zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, serta kawasan lindung lainnya. Sementara itu kawasan budidaya meliputi zona pertanian, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona sarana pelayanan umum, zona campuran, serta zona peruntukan lainnya. Pengaturan tersebut tercantum dalam ketentuan zonasi RDTR Petang yang menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Petang, termasuk Desa Belok-Sidan, memiliki dominasi fungsi pertanian dan kawasan lindung dengan dukungan pengembangan aktivitas ekonomi terbatas.

Zona pertanian dalam RDTR Petang terdiri dari subzona tanaman pangan (P-1), hortikultura (P-2), dan perkebunan (P-3) yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi pertanian. Selain itu, RDTR juga mengatur kawasan lindung seperti badan air (BA), hutan lindung (HL), serta perlindungan setempat (PS) yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan dan sistem hidrologi wilayah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Petang diarahkan sebagai kawasan konservasi air dan pertanian berkelanjutan.

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR Petang juga diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus mengacu pada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), program prioritas pemanfaatan ruang, serta peraturan zonasi sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi tersebut menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, pengendalian pembangunan, serta penetapan lokasi investasi di wilayah Kecamatan Petang.

Jika dikaitkan dengan pembangunan Bendungan Sidan di Desa Belok-Sidan, maka pembangunan bendungan tersebut berada pada zona badan air dan kawasan lindung yang berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya air. RDTR Petang juga mengizinkan kegiatan wisata tirta, daya tarik wisata alam, serta kegiatan terkait pemanfaatan badan air dengan persyaratan tertentu, seperti dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan. Hal ini

menunjukkan bahwa pembangunan bendungan dapat diarahkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata berbasis air dan konservasi lingkungan.

Selain itu, RDTR Petang juga menetapkan ketentuan khusus pada kawasan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang menekankan pelestarian lahan pertanian, pemantapan jaringan irigasi, serta pengembangan jalan usaha tani. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembangunan bendungan, fungsi pertanian tetap harus dipertahankan sebagai bagian dari struktur ekonomi wilayah Kecamatan Petang.

Dengan demikian, berdasarkan RDTR Kecamatan Petang, pembangunan Bendungan Sidan menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang dari sebagian zona pertanian menjadi zona badan air dan infrastruktur pendukung. Namun perubahan tersebut masih sejalan dengan arahan RDTR yang menempatkan Kecamatan Petang sebagai kawasan konservasi air, pertanian berkelanjutan, dan pengembangan wisata alam. Pembangunan bendungan juga berpotensi meningkatkan aksesibilitas wilayah dan mendorong perkembangan aktivitas ekonomi baru seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata di sekitar kawasan bendungan.

Keterkaitan Dinamika Sosial Ekonomi dengan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya yang mencakup perubahan kebiasaan masyarakat, perubahan mata pencaharian, serta perubahan pendapatan masyarakat di Desa Belok-Sidan akibat pembangunan Bendungan Sidan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berdampak secara fisik terhadap tata ruang wilayah, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat. Perubahan tata ruang yang terjadi akibat pembangunan bendungan mengakibatkan perubahan fungsi ruang dari sebagian kawasan pertanian menjadi kawasan badan air, infrastruktur, serta kawasan dengan potensi ekonomi baru seperti perdagangan dan pariwisata. Perubahan fungsi ruang ini kemudian memicu perubahan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan bendungan.

Perubahan pertama terlihat pada mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan cenderung mengalami perubahan mata pencaharian, seperti beralih menjadi pedagang, pekerja proyek bendungan, *security*, serta wirausaha kecil. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan struktur ruang yang menghadirkan aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan bendungan. Sementara itu, masyarakat yang terkena langsung sebagian besar tetap mempertahankan mata pencaharian sebagai petani karena lahan pertanian mereka hanya sebagian kecil yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tata ruang tidak selalu menghilangkan aktivitas ekonomi lama, tetapi dapat menciptakan diversifikasi mata pencaharian masyarakat.

Perubahan kedua terlihat pada pendapatan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat terdampak mengalami peningkatan pendapatan akibat munculnya peluang ekonomi baru seperti berdagang dan bekerja pada proyek bendungan. Sebaliknya, masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan relatif tidak mengalami perubahan pendapatan yang signifikan karena masih bergantung pada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan tata ruang akibat pembangunan bendungan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, namun manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Perubahan ketiga terjadi pada kebiasaan masyarakat. Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan akses jalan baru telah meningkatkan mobilitas masyarakat antar wilayah, khususnya antara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli. Kemudahan akses ini mengubah pola interaksi sosial masyarakat, terutama dalam kegiatan silaturahmi, aktivitas ekonomi, serta hubungan sosial antar desa. Masyarakat menjadi lebih mudah berinteraksi dan melakukan kegiatan ekonomi lintas wilayah. Perubahan kebiasaan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam tata ruang wilayah dapat mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat.

Perubahan keempat terlihat pada sikap masyarakat terhadap pembangunan. Sebagian besar masyarakat terdampak menunjukkan sikap positif terhadap pembangunan bendungan karena memberikan peluang ekonomi baru dan meningkatkan aksesibilitas wilayah. Namun demikian, terdapat pula potensi kekhawatiran terhadap perubahan sosial budaya, persaingan ekonomi, serta kemungkinan berkurangnya lahan pertanian. Sikap masyarakat ini menunjukkan bahwa perubahan tata ruang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan.

Perubahan kelima terjadi pada pemanfaatan ruang wilayah. Sebelum pembangunan bendungan, wilayah Desa Belok-Sidan didominasi oleh pemanfaatan ruang pertanian. Setelah pembangunan bendungan, terjadi perubahan pemanfaatan ruang menjadi kawasan badan air, infrastruktur jalan, serta kawasan dengan potensi ekonomi seperti perdagangan dan pariwisata. Perubahan pemanfaatan ruang ini sejalan dengan arahan RTRW Kabupaten Badung yang menetapkan Kecamatan Petang sebagai kawasan agropolitan, kawasan pertanian pangan terintegrasi, serta kawasan konservasi lingkungan. Dengan demikian, perubahan tata ruang akibat pembangunan bendungan masih berada dalam koridor arahan RTRW selama fungsi lindung dan pertanian tetap dipertahankan.

Penataan ruang berperan penting dalam mengarahkan dinamika sosial ekonomi tersebut agar tetap terkendali dan berkelanjutan. RTRW Kabupaten Badung dan RDTR Kecamatan Petang menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang kawasan bendungan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Penataan ruang juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi baru dengan perlindungan kawasan pertanian dan konservasi lingkungan.

Dengan demikian, keterkaitan antara dinamika sosial ekonomi masyarakat dan penataan ruang sangat erat. Perubahan tata ruang akibat pembangunan bendungan memicu perubahan mata pencaharian, pendapatan, kebiasaan, sikap masyarakat, serta pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang melalui RTRW dan RDTR menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi lingkungan dan keberlanjutan wilayah.

4. KESIMPULAN

Pembangunan bendungan telah memberikan perubahan pada struktur ruang dan dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Belok-Sidan. Perubahan tersebut terlihat pada aspek kebiasaan masyarakat, mata pencaharian, serta pendapatan masyarakat yang mengalami pergeseran setelah pembangunan bendungan. Secara umum, perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa pembangunan bendungan tidak hanya berdampak pada perubahan fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Badung dan RDTR Kecamatan Petang, pembangunan Bendungan Sidan pada dasarnya sejalan dengan arahan penataan ruang yang menetapkan Kecamatan Petang sebagai kawasan pertanian berkelanjutan, kawasan agropolitan, dan kawasan konservasi sumber daya air. Pembangunan bendungan mendukung pengelolaan sumber daya air, peningkatan irigasi pertanian, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata dan perdagangan. Namun demikian, perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi perlu dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung dan fungsi pertanian yang menjadi karakter utama wilayah Kecamatan Petang. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Bendungan Sidan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali. Pengembangan kawasan bendungan sebaiknya tetap memperhatikan arahan RTRW dan RDTR Kecamatan Petang yang menempatkan wilayah tersebut sebagai kawasan pertanian dan konservasi. Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, seperti wisata alam, pertanian, dan usaha mikro masyarakat di sekitar bendungan. Pengembangan tersebut harus disertai dengan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi secara berkelanjutan. Penyediaan program

pemberdayaan masyarakat bagi kelompok yang terdampak pembangunan bendungan, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan diversifikasi mata pencaharian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi wilayah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian dengan menjaga sistem irigasi, akses lahan pertanian, serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Upaya ini penting untuk menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak pembangunan bendungan terhadap perubahan penggunaan tanah, perubahan nilai tanah, serta konflik pemanfaatan ruang agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika tata ruang di kawasan bendungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al Noor, Sanzidur Rahman, Stephen Essex, and James Benhin. 2020. "Economic Contributions of Mega-Dam Infrastructure as Perceived by Local and Displaced Communities: A Case Study of Merowe Dam, Sudan." *Agriculture (Switzerland)* 10(6):1–25. doi: 10.3390/agriculture10060227.
- Achmad, Irawaty. 2019. "Kondisi Sosial Penyandang Tunawisma Ditengah Masyarakat Kota Makassar." *Journal UNM* 1–19.
- Alpriandi, Pangemanan Lyndon, and Moniaga Vicki. 2019. "Dampak Pembangunan Waduk Kuwil Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Pembangunan Waduk Kuwil Desa Kawang-Koan Kabupaten Minahasa Utara." *Agrirud* 1(1):20–30.
- Astuti, Puji. 2018. "Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Sempor Bagi Masyarakat Kebumen Tahun 1956-1978." *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* 3(5)(March):5–10.
- Azizah, Annisa Nur, Dasim Budimansyah, and Wahyu Eridiana. 2018. "Bentuk Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Pasca Pembangunan Waduk Jatigede." *Sosietas* 7(2):399–406. doi: 10.17509/sosietas.v7i2.10356.
- Eka, Andi, Iftitah Nurdin, Imas Adilah Pribadi, Susanti Dewi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, and Kementerian Keuangan. 2022. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bendungan Terhadap Perekonomian- Kesejahteraan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 3(2):170–85. doi: 10.33105/jmp.v3i2.419.
- Cernea, M. M. 2004. *Social Impacts and Social Risks in Hydropower Programs: Preemptive Planning and Counter-risk Measures. World Bank Social Development Papers.*
- Ferdini, Hadiyanti. 2019. "Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo." *E-Journal UNESA* 2(1):308–17.
- Hadi Sabari Yunus. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian ATR/BPN. 2021. *Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi.* Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Jannataa, Sareiyang Adam. 2021. "Desain Hidrolis Terowongan Pengelak (Studi Kasus Pembangunan Bendungan Sidan Di Kab. Badung Bali)." 8–9.
- Juhadi. 2007. "Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan." *Jurnal Geografi* 4(1):11–24.
- Maruwae, Abdulrahim. 2020. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran." 13:39–53.
- Noor, Triana Rosalina, Ali Hamdan, Saifuddin, and M. Athoifull Fanan. 2017. "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kec . Wringinanom , Kec . Kedamean , Kec . Driyorejo Kabupaten Gresik)." *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti* 1(3):268–80.

- Rahmayanti, Dwi, V. Indah, and Sri Pinasti. 2014. "Dampak Keberadaan Objek Wisata... (Yunita Dwi Rahmayanti) Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk Sremo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sremo, Kulon Progo, Daerah Istimewah Yogyakarta." *E-Societas* 1–15.
- Ridayani, Wislin, Muhammad Alwi, and Suprianto. 2023. "Dampak Pembangunan Bendungan Batu Bulan Terhadap Kondisi Sosek Petani Padi Sumbawa." *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan* 2(2):13–21.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Rofiulloh, Gayuh, and Mahasiswa. n.d. "Dampak Pembagunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi." *Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 1–6.
- Tarigan, R. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilt, B., Braun, Y., & He, D. 2009. Social impacts of large dam projects: A comparison of international case studies and implications for best practice. *Journal of Environmental Management*, 90(3), 249–257.
- Wayangkau, Helen Gianditha. 2021. "Analisis Manajemen Risiko Pada Proyek Pembangunan Bendungan (Studi Kasus : Bendungan Titab Di Bali, Bendungan Jatibarang Di Kabupaten Semarang Dan Bendungan Diponegoro Di Semarang)." *Jurnal Proyek Teknik Sipil* 4(1):18–23. doi: 10.14710/potensi.2021.10628.
- Wibowo, Anang Setyo. 2017. "Persepsi Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Area Terdampak Pembangunan Waduk Di Dusun Bendo Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo." *Swara Bhumi* 05(4):22– 30.
- World Commission on Dams. 2000. *Dams and Development: A New Framework for Decision-Making*. London: Earthscan.
- Yunus, H. S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Petang Tahun 2023 – 2043
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025 - 2045
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.